

**RENCANA PEMBANGUNAN MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
ANAK DI INDONESIA**

**Dian Tazkiya⁽¹⁾, Khaira Amalina⁽²⁾, Naila Nur Fadhy⁽³⁾, Samdarawita⁽⁴⁾, Teuku
Zulkarnain⁽⁵⁾**

^{1,2,3,4,5}Bisnis, Politeknik Negeri Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe

e-mail: diantazkia1512@gmail.com¹; khairaamalina05@gmail.com²; nailafadhy@gmail.com³;
samdarawitaa@gmail.com⁴; t.zulkarnain1979@gmail.com⁵

ABSTRACT

The Free Nutritious Meal Program (MBG) is one of the Indonesian government's priority policies under President Prabowo Subianto's administration, aimed at reducing stunting rates, improving children's health, and enhancing the overall quality of education. The program was initiated in response to the persistent issues of malnutrition and unequal access to education, with approximately 21.5% of Indonesian children still suffering from stunting. MBG serves not only as a nutritional intervention but also as a socio-economic strategy to strengthen human resources and promote educational equity. This study employs a qualitative descriptive approach, collecting primary data through in-depth interviews with teachers, school principals, health workers, and local government representatives involved in the implementation of MBG. Secondary data were obtained from official reports by relevant ministries and agencies, as well as scientific publications. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, presentation, and conclusion drawing, with validation ensured by triangulation of sources and methods. The findings indicate that the implementation of the MBG program has had positive impacts on improving children's nutritional status, reducing stunting rates, and increasing students' motivation and learning concentration. The program also generates significant economic effects by involving local farmers, MSMEs, and cooperatives as food suppliers, thereby creating a multiplier effect for regional economies. However, several challenges remain, including limited funding, uneven distribution, and inadequate infrastructure. Overall, the MBG program is considered a strategic initiative to build a healthy, intelligent, and competitive generation while strengthening the synergy between the education, health, and economic sectors.

Keywords: *Free Nutritious Meal Program, education, child health, nutrition, government policy.*

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan prioritas pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk menurunkan angka stunting, meningkatkan kesehatan anak, serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional. Latar belakang munculnya program ini didasari oleh tingginya angka kekurangan gizi dan ketimpangan akses pendidikan di Indonesia, di mana sekitar 21,5% anak masih mengalami stunting. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai intervensi gizi, tetapi juga sebagai strategi sosial-ekonomi untuk memperkuat sumber daya manusia dan pemerataan pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan guru, kepala sekolah, tenaga kesehatan, serta instansi pemerintah daerah yang terlibat dalam pelaksanaan MBG. Data

sekunder diperoleh dari laporan resmi kementerian dan lembaga terkait, serta publikasi ilmiah. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, dengan validasi menggunakan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program MBG memberikan dampak positif terhadap peningkatan status gizi anak, penurunan angka stunting, serta peningkatan semangat dan konsentrasi belajar siswa. Program ini juga memiliki efek ekonomi yang luas dengan melibatkan petani, UMKM, dan koperasi lokal sebagai pemasok bahan pangan, sehingga menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah. Namun demikian, sejumlah kendala masih ditemui, seperti keterbatasan anggaran, ketimpangan distribusi, dan kesiapan infrastruktur. Secara keseluruhan, Program MBG dinilai sebagai langkah strategis dalam membangun generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat sinergi antara sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi nasional.

Kata kunci: Makan Bergizi Gratis, pendidikan, kesehatan anak, gizi, kebijakan pemerintah.

PENDAHULUAN

Kualitas pendidikan berkaitan erat dengan berbagai elemen penting seperti input, proses, output, dan hasil pembelajaran yang menjadi tolok ukur keberhasilan sistem pendidikan (Mukhid, 2007). Pendidikan yang berkualitas tercermin dari kompetensi guru, pemerataan akses, relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembelajaran yang inklusif. Indikator lain meliputi kemampuan siswa dalam literasi, numerasi, dan pemecahan masalah. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebijakan seperti Merdeka Belajar, peningkatan infrastruktur sekolah, serta pelatihan guru berkelanjutan perlu diterapkan (Nadziroh dkk., 2023). Kebijakan tersebut berperan dalam mengurangi kesenjangan kualitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan, terutama dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Pemerintah Indonesia memiliki peran sentral dalam membangun sistem pendidikan yang sistemik, inklusif, dan berkelanjutan melalui penguatan literasi dan numerasi berbasis data dan konteks lokal (Kurniasari, 2021). Penyesuaian kurikulum agar relevan dengan kebutuhan daerah, pemerataan akses pendidikan hingga wilayah 3T, serta peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan dan sistem insentif kinerja (Sari, 2020) juga menjadi langkah

penting. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran harus diarahkan untuk mengurangi kesenjangan digital dan memperkuat kapasitas guru di era revolusi industri 4.0.(Albaburrahim et al., 2025)

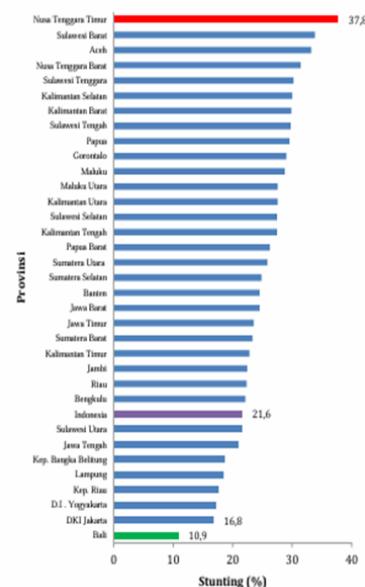
Salah satu program yang saat ini menjadi sorotan publik adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan mengatasi masalah stunting, gizi buruk, serta meningkatkan semangat belajar siswa melalui pemberian makanan sehat tanpa biaya di sekolah. Meski memiliki manfaat besar, seperti peningkatan asupan gizi, penurunan angka stunting, dan peningkatan motivasi belajar, pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai kendala, termasuk ketimpangan distribusi, keterbatasan anggaran, serta kesiapan infrastruktur pendukung yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. (Mandiri & Yelvianti, 2025)

MBG merupakan kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk mengatasi permasalahan gizi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, terutama di kalangan anak-anak dan ibu hamil. Sejak diumumkan, rancangan pelaksanaannya terus mengalami perkembangan. Awalnya dikenal sebagai “program makan siang gratis”, kebijakan ini kemudian diperluas menjadi pemberian MBG dua kali sehari, pada waktu pagi dan siang. Perluasan tersebut didasarkan pada

temuan Kementerian Kesehatan dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang menunjukkan bahwa sekitar 41 persen siswa di Indonesia masih mengalami kelaparan saat mengikuti kegiatan belajar di sekolah, sehingga berdampak negatif terhadap konsentrasi dan kualitas pendidikan mereka.(Atikah Merlinda & Yusuf, 2025)

MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan target nutrisi global 2025 yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) dan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), yang berfokus pada upaya mengatasi permasalahan gizi sebagai hambatan utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Target tersebut mencakup penurunan angka stunting, anemia, berat badan lahir rendah, kelebihan berat badan, peningkatan pemberian ASI eksklusif, serta pengurangan kasus wasting. WHO menilai bahwa program makan bergizi gratis merupakan bagian dari strategi promotif dan preventif dalam sistem kesehatan masyarakat, sekaligus menegaskan bahwa akses terhadap makanan sehat dan bergizi merupakan hak dasar setiap individu. Penyediaan makanan bergizi, terutama bagi anak-anak, dipandang penting dalam meningkatkan status gizi, daya tahan tubuh, serta kemampuan kognitif mereka. Namun, tantangan gizi di Indonesia masih cukup besar—Survei Kesehatan Indonesia (SKI)

2023 mencatat prevalensi stunting nasional sebesar 21,5%, hanya turun 0,8% dari tahun sebelumnya, dan masih jauh dari target RPJMN 2020–2024 sebesar 14%. Untuk menanggapi kondisi tersebut, pemerintah meluncurkan Program MBG pada awal 2025. Meski demikian, respons masyarakat terhadap kebijakan ini masih beragam; berdasarkan survei GoodStats, hanya 21% masyarakat yang mendukung program ini, sementara sekitar 20% lainnya mengaku belum memiliki pendapat atau tidak mengetahui detail program tersebut, menunjukkan masih terbatasnya pemahaman publik mengenai tujuan dan pelaksanaan MBG.(Rahmah et al., 2025)



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

paripurna, yaitu pribadi yang utuh dan mampu mengintegrasikan iman, ilmu, serta amal dalam kehidupannya (Daryanto, 2013). Mutu pendidikan suatu lembaga dapat dikatakan baik apabila mampu mencapai standar atau target yang telah ditetapkan.

Upaya peningkatan mutu pendidikan menjadi prioritas utama bagi setiap lembaga, karena merupakan bagian penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, tenaga pendidik dan kependidikan perlu memiliki

LANDASAN TEORI

1. Faktor Gizi sebagai Penentu Kualitas Pendidikan

Pendidikan yang berkualitas merupakan proses pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan dengan kompetensi menyeluruh, mencakup kemampuan akademik, kejuruan, personal, dan sosial yang berlandaskan nilai-nilai moral dan akhlak mulia. Seluruh aspek tersebut membentuk kecakapan hidup (*life skill*) yang menuntun individu menjadi manusia

prinsip manajemen yang kuat dalam mengarahkan perubahan menuju pendidikan yang lebih berkualitas (Arends, 2013). Pendidikan juga memiliki peranan strategis dalam membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, berdaya saing, serta memiliki semangat kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang bersifat praktis, ilmu pendidikan berfokus pada penerapan teori dan praktik yang berpengaruh langsung terhadap proses pembelajaran dan perkembangan peserta didik (Ali, 2017). (Halawa & Mulyanti, 2023)

Pendidikan yang bermutu tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan metode pembelajaran, tetapi juga oleh berbagai faktor eksternal yang memengaruhi perkembangan kognitif serta fisik peserta didik. Salah satu aspek penting yang mendukung keberhasilan proses pendidikan adalah kecukupan gizi pada anak sekolah, karena berperan dalam meningkatkan kemampuan berpikir, daya tahan tubuh, dan semangat belajar (UNESCO, 2021). Asupan gizi yang seimbang membantu siswa untuk lebih berkonsentrasi selama kegiatan belajar, sehingga materi pelajaran dapat diserap dengan lebih optimal. Selain itu, kondisi gizi yang baik turut menunjang pertumbuhan fisik yang sehat, yang pada akhirnya memperkuat kemampuan motorik dan interaksi sosial di lingkungan sekolah. Meski demikian, di banyak negara berkembang termasuk Indonesia, kesenjangan akses terhadap makanan bergizi masih menjadi persoalan serius yang berpengaruh langsung terhadap mutu pendidikan. (Rif'iy et al., 2025).

2. Pemerataan Pendidikan

Di Indonesia, masalah gizi buruk dan ketimpangan akses pendidikan masih menjadi isu struktural yang signifikan, memengaruhi pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, serta kemampuan emosional anak yang berdampak pada proses belajar dan partisipasi pendidikan.

Data Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan tingginya jumlah anak yang tidak bersekolah serta rendahnya capaian nutrisi pada kelompok rentan, termasuk anak usia sekolah, balita, dan ibu hamil. Kondisi ini menekankan pentingnya intervensi holistik yang mengintegrasikan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial secara bersamaan, bukan hanya intervensi sektoral yang terfragmentasi. Program MBG hadir sebagai solusi multisektoral dengan memberikan makanan bergizi di sekolah, yang tidak hanya meningkatkan status gizi anak, tetapi juga mendukung kehadiran, retensi, dan pemerataan kesempatan belajar. Program ini dirancang sesuai pedoman World Food Programme (WFP, 2020) dan African Union, dengan tujuan menciptakan ekosistem pembelajaran yang inklusif, berkelanjutan, dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan. (Agustini & Mulyani, 2025).

3. Program Pemerintah (MBG)

Program MBG diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada Januari 2025 melalui Perpres No. 83 Tahun 2024 dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 (Herniati & Hamzanwadi Pancor Lombok Timur, 2025), dengan tujuan utama memberikan akses makanan bergizi bagi anak-anak, terutama dari keluarga berpenghasilan rendah, sebagai bagian dari strategi nasional untuk menurunkan stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Syafiqoh, 2025). Meskipun telah menjangkau lebih dari 3,3 juta penerima manfaat, program ini mendapat kritik terkait keamanan pangan, distribusi, dan efisiensi anggaran (Ritonga & Sazali, 2025). MBG bukan sekadar bantuan sosial, tetapi juga merupakan strategi sistemik dengan dimensi sosial-politik dan ideologis, yang secara resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai prioritas nasional untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan menurunkan prevalensi stunting (Gratis et al., 2025). Implementasinya melibatkan Kementerian

Pertahanan, TNI, dan Kogabwilhan III untuk memastikan distribusi makanan hingga wilayah terpencil, contohnya di Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, yang berhasil dilaksanakan berkat dukungan logistik dan keamanan dari TNI (Kiftiyah et al., 2025). (Rahayu, 2025)

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 83 Tahun 2024 menetapkan pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemenuhan gizi nasional, termasuk program MBG (Peraturan Presiden, 2024). Program MBG diharapkan tidak hanya mengatasi masalah gizi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap semangat dan motivasi belajar siswa. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, seperti asupan makan siang bergizi, siswa diharapkan lebih siap secara fisik maupun mental untuk mengikuti proses pembelajaran di sekolah. (Kelas et al., n.d.).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam pelaksanaan MBG dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai kebijakan, implementasi, serta tantangan yang dihadapi dalam program tersebut. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait seperti guru, kepala sekolah, tenaga kesehatan, serta perwakilan dari instansi pemerintah daerah yang terlibat dalam pelaksanaan MBG. Selain itu, dilakukan observasi langsung di beberapa sekolah penerima manfaat program guna melihat secara nyata proses distribusi, kualitas makanan, serta dampak yang dirasakan oleh peserta didik.

Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi dari berbagai sumber resmi seperti laporan Kementerian

Pendidikan, Kementerian Kesehatan, BGN, serta publikasi ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga dengan teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keakuratan dan konsistensi temuan. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program, mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan anak di masa mendatang melalui optimalisasi pelaksanaan Program MBG.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

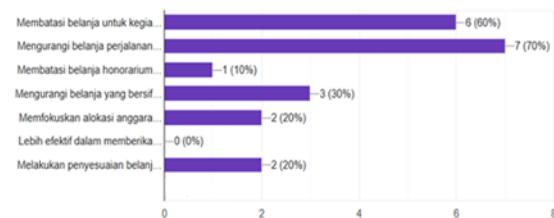
Gagasan mengenai penyediaan makanan gratis pertama kali muncul pada Juli 2006 ketika Prabowo mulai menaruh perhatian serius terhadap persoalan stunting di Indonesia. Berdasarkan data yang dikumpulkan, sekitar 30% balita saat itu mengalami stunting akibat kurangnya asupan gizi (Hidayatullah, 2024). Hingga tahun 2024, oleh karena itu prevalensi stunting nasional tercatat sebesar 14%, angka yang masih tergolong tinggi dan memerlukan intervensi konkret. Keprihatinan tersebut kemudian mendorong Prabowo untuk merealisasikan program pemberian MBG bagi para pelajar di seluruh Indonesia setelah menjabat sebagai Presiden, yang akhirnya diformulasikan dalam kebijakan resmi bernama (MBG) (Tarmizi, 2024). Sejumlah penelitian menilai MBG sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan kualitas sumber daya manusia. Maharani, Namira, dan Chairunnisa (2024) menilai program ini sebagai terobosan progresif yang berpotensi menekan angka kelaparan, terutama di kalangan anak-anak sekolah dan balita, sekaligus meningkatkan kesehatan serta prestasi akademik. Fauzi (n.d.) menambahkan bahwa MBG merupakan

bagian dari transformasi sistem pendidikan modern dan bentuk difusi inovasi sosial, meskipun pelaksanaannya menghadapi tantangan seperti kesiapan infrastruktur, penentuan prioritas kebijakan, serta potensi ketergantungan terhadap negara. Selain itu, keberhasilan program juga sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan implementasinya dengan nilai budaya dan konteks sosial masyarakat setempat. Sementara itu, Andin dan rekan-rekannya (2024) menilai MBG memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan sosial melalui penyediaan makanan bergizi gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Dengan terpenuhinya kebutuhan gizi, anak-anak memiliki kesempatan lebih besar untuk belajar secara optimal sekaligus memperoleh kesehatan yang lebih baik, sehingga program ini menjadi wujud nyata dari upaya mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.(Nurul Azzahra et al., 2025)

Melihat besarnya potensi program tersebut dalam mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas pendidikan, gagasan MBG kemudian diadopsi menjadi salah satu agenda prioritas dalam visi politik pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka. Melihat besarnya potensi tersebut Program pemberian makanan gratis merupakan salah satu janji kampanye yang diusung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka. Kebijakan ini berorientasi pada penyediaan asupan nutrisi yang memadai bagi anak-anak guna meningkatkan kemampuan belajar, konsentrasi, dan prestasi akademik mereka di sekolah. Melalui penyediaan makan siang gratis, diharapkan peserta didik dapat lebih fokus dalam kegiatan belajar mengajar dan mencapai hasil yang lebih optimal. Program ini termasuk dalam kategori kebijakan sosial, yang dalam konteks ekonomi dikenal sebagai kebijakan “Robin Hood” — yakni bentuk redistribusi sumber daya dari kelompok berdaya ke

kelompok yang membutuhkan (Septiani et al., 2024; Press UGM, 2025). Mengingat kompleksitas pelaksanaannya, pemerintah perlu merancang perencanaan, penganggaran, serta sistem pelaksanaan yang menyeluruh dan terstruktur untuk mendukung visi kepemimpinan Prabowo-Gibran (Rahmawati, 2024).

Menteri Keuangan juga menegaskan bahwa pemerintah menargetkan defisit anggaran tahun 2025 berada pada kisaran 2,45% hingga 2,8%, sedikit lebih tinggi dibandingkan target tahun 2024 sebesar 2,29% (Rasyidin, 2024; Septiani et al., 2024). Secara teoritis, kebijakan ini sejalan dengan pendekatan rasionalisme yang menekankan pentingnya penggunaan data, analisis biaya-manafaat, serta simulasi kebijakan secara sistematis dalam proses perumusannya (Andi Weyana Nurul Khatimah et al., 2025).

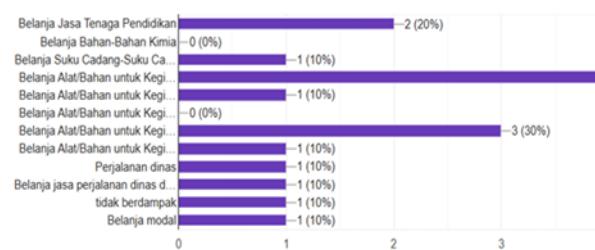


Grafik 1 Persentase dampak yang dialami sekolah terhadap 7 efisiensi dana Kemendikdasmen

Berdasarkan grafik 4.5, dipaparkan bahwa 60% sekolah mengalami keterbatasan alokasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi dan seminar; 70% sekolah mengalami keterbatasan alokasi belanja pada perjalanan dinas; 10% sekolah mengalami keterbatasan alokasi belanja honorarium kegiatan sekolah; 30% sekolah mengalami keterbatasan alokasi dana pada item-item dengan output yang kurang terukur; 20% sekolah merasa harus memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik; dan 20% sekolah harus

menyesuaikan alokasi belanja sesuai dengan APBD.

Selain poin efisiensi yang tertera pada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025, terdapat pula dampak efisiensi pada kode rekening yang lebih spesifik, yang dipaparkan pada grafik 4.6 berikut.



Grafik 2 Dampak Efisiensi pada Kode Rekening Spesifik

Berdasarkan grafik 4.6, didapat bahwa 20% sekolah merasakan dampak pada kode rekening Belanja Jasa Tenaga Pendidikan; 10% pada kode rekening Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium; 40% pada kode rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor; 10% pada kode rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover; 30% pada kode rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor; 10% pada kode rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik; 20% pada kode rekening Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Luar Kota; serta 10% pada kode rekening Belanja Modal. Menurut responden, efisiensi anggaran pada kode rekening belanja yang lebih spesifik juga berdampak pada beberapa hal, yaitu pengurangan alokasi dana untuk sovenir seminar, konsumsi kerja bakti, suku cadang yang dibutuhkan sekolah, serta pengembangan guru dan tenaga kependidikan.

Selanjutnya, kebijakan MBG di Indonesia menjadi salah satu isu strategis dalam kajian ekonomi politik karena dinilai

memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Kebijakan MBG di Indonesia menjadi salah satu isu strategis dalam kajian ekonomi politik karena dinilai memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Program ini dirancang untuk menyediakan makanan bergizi secara gratis bagi kelompok rentan, meliputi ibu hamil, anak balita, hingga pelajar tingkat SMA. Berdasarkan estimasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pelaksanaan program MBG pada tahun 2025 diperkirakan dapat memberikan kontribusi sekitar 0,86% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk mendukung program ini, yang diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi di sektor pertanian, pangan, logistik, serta memperkuat kemandirian daerah dalam bidang pangan, energi, dan air (Nugraha, 2024). Sejalan dengan hal tersebut, laporan dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF, 2024) juga menunjukkan bahwa kebijakan ini berpotensi menambah Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,06% atau setara dengan Rp14,61 triliun pada PDB harga berlaku tahun 2025. Selain itu, implementasi MBG diperkirakan dapat mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja hingga 0,19% serta pertumbuhan upah sebesar 0,39%, yang secara keseluruhan mencerminkan dampak positif program ini terhadap perekonomian nasional.(Nissa et al., 2025).

Selain memberikan dampak ekonomi secara makro, Program MBG di sekolah tidak hanya berfungsi sebagai upaya intervensi gizi, tetapi juga berpotensi besar memperkuat perekonomian lokal melalui keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta petani lokal. Dalam ranah administrasi publik, efektivitas dinilai dari sejauh mana hasil

yang dicapai sesuai dengan rencana dan pemanfaatan sumber daya yang telah dialokasikan (Gultom, Khairina, dan Salsabila 2024; Isti'anah dan Arif 2023; Anis, Usman, dan Arfah 2021; Azizah, Rostyaningsih, dan Lestari 2023).

Suatu program dapat dikatakan efektif apabila mampu menurunkan angka stunting, meningkatkan kehadiran serta konsentrasi siswa di sekolah, dan turut mendorong perekonomian lokal melalui keterlibatan UMKM sebagai penyedia bahan pangan. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Namun demikian, tingkat efektivitas sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem pelaksanaan, mulai dari perencanaan anggaran, distribusi logistik, mutu makanan, hingga mekanisme pengawasan. Tanpa adanya koordinasi yang solid antarinstansi dan pengawasan yang memadai, program dapat menghadapi risiko seperti pemborosan sumber daya, penyalahgunaan anggaran, atau penyediaan makanan yang tidak memenuhi standar gizi.

Kebijakan MBG hanya dapat berjalan efektif apabila dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yakni akuntabilitas, efisiensi, transparansi, partisipasi masyarakat, serta responsivitas terhadap kebutuhan publik. Dengan jutaan siswa menjadi penerima manfaat setiap harinya, permintaan terhadap bahan pangan seperti beras, sayuran, buah-buahan, telur, dan lauk pauk meningkat secara signifikan dan berkelanjutan, sehingga membuka peluang pasar baru bagi produsen lokal sebagai pemasok utama dalam rantai pasok program tersebut. Apabila sedikitnya 60% kebutuhan bahan pangan dapat diserap dari hasil produksi petani lokal, maka dampaknya akan sangat besar terhadap peningkatan pendapatan petani dan pelaku usaha kecil. Selain itu, keterlibatan koperasi tani, kelompok wanita tani, dan UMKM katering lokal dalam penyediaan serta pengolahan makanan dapat menciptakan

efek pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian pedesaan. Tidak hanya mendorong produktivitas sektor pertanian, pelaksanaan program ini juga berkontribusi pada perluasan lapangan kerja di bidang logistik, pengolahan, dan distribusi makanan di berbagai wilayah, terutama di daerah tertinggal. (Basit & Ramadani, 2025).

Menurut Hardinsyah (2022), tercukupinya asupan gizi berperan penting dalam meningkatkan konsentrasi dan kemampuan kognitif anak, yang secara langsung berpengaruh pada prestasi akademik. Hal ini sejalan dengan hasil survei yang menunjukkan bahwa siswa yang memperoleh makanan bergizi di sekolah cenderung lebih fokus dan termotivasi dalam belajar. Soekirman (2021) menambahkan bahwa program gizi sekolah merupakan strategi efektif untuk memperbaiki status gizi anak, yang pada akhirnya mendukung pembangunan kualitas sumber daya manusia. Meski demikian, implementasi Program MBG menghadapi berbagai tantangan, salah satunya keterbatasan anggaran yang menjadi kendala utama di banyak sekolah (Aritonang, 2023). Selain itu, masalah logistik dan distribusi, keterbatasan fasilitas dan tenaga pengelola, serta kebiasaan makan yang tidak sehat pada siswa turut menjadi hambatan. Kurangnya edukasi gizi bagi siswa dan orang tua juga memengaruhi efektivitas program ini, sebagaimana diungkapkan oleh Khomsan (2023). (Pringsewu et al., 2025).

Pelaksanaan program MBG dalam jangka panjang terbukti memberikan pengaruh positif terhadap penurunan angka malnutrisi serta peningkatan tingkat kehadiran siswa di sekolah. Temuan ini mengindikasikan bahwa penyediaan makanan bergizi tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik anak, tetapi juga mendukung keberlanjutan proses belajar mereka. Dengan kondisi tubuh yang lebih sehat dan berenergi, siswa cenderung lebih rajin hadir dan mampu menunjukkan

prestasi akademik yang lebih baik. Meski demikian, keberhasilan tersebut memerlukan penerapan yang konsisten serta pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan. (Nango et al., 2025).

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Program MBG di sekolah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan status gizi peserta didik. Pemberian makanan bergizi secara rutin terbukti mampu memenuhi kebutuhan energi dan protein anak, sehingga mendukung pertumbuhan fisik yang lebih optimal. Temuan Zilda Maulina Jizantara (2016) menegaskan bahwa penyelenggaraan makan siang sesuai standar gizi berperan penting dalam menjaga kesehatan anak sekaligus mencegah terjadinya malnutrisi. Selain itu, terpenuhinya asupan nutrisi di sekolah juga berdampak positif terhadap stamina dan konsentrasi siswa selama proses pembelajaran karena kebutuhan energi dan mikronutriennya tercukupi. Di sisi lain, penelitian Ulfatul Karomah et al. (2024) mengungkapkan bahwa siswa yang rutin mengikuti program MBG memiliki Indeks Massa Tubuh menurut Usia (IMT/U) yang lebih stabil dibandingkan dengan siswa yang tidak berpartisipasi secara rutin. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan gizi seimbang melalui program tersebut tidak hanya membantu menurunkan risiko kekurangan gizi, tetapi juga memperkuat kondisi fisik anak dan meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan akademik maupun non-akademik di sekolah. (Zulaika et al., 2025).

KESIMPULAN DAN SARAN

Program MBG merupakan salah satu kebijakan strategis nasional yang digagas oleh pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak di seluruh wilayah Indonesia. Program ini berangkat dari kesadaran bahwa masalah gizi buruk, stunting, dan ketimpangan akses pendidikan masih menjadi persoalan

mendasar yang menghambat pembangunan sumber daya manusia. Melalui pemberian makanan bergizi secara gratis di sekolah, MBG tidak hanya berupaya menurunkan prevalensi stunting, tetapi juga meningkatkan konsentrasi belajar, semangat, dan prestasi akademik peserta didik. Dengan demikian, program ini memiliki peran ganda: sebagai intervensi gizi sekaligus sebagai instrumen pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Pelaksanaan MBG juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Dengan melibatkan petani lokal, pelaku UMKM, koperasi tani, dan penyedia jasa katering daerah, program ini mendorong tumbuhnya ekonomi lokal serta menciptakan efek pengganda (multiplier effect) di berbagai sektor seperti pertanian, pangan, logistik, dan perdagangan. Menurut kajian Bappenas dan INDEF, implementasi MBG dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan MBG bukan hanya kebijakan sosial, tetapi juga strategi ekonomi yang berorientasi pada kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, keberhasilan pelaksanaan program MBG tidak terlepas dari berbagai tantangan. Beberapa kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, distribusi makanan yang belum merata antarwilayah, kurangnya infrastruktur pendukung di daerah terpencil, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang. Selain itu, masih ditemukan masalah terkait pengawasan mutu makanan, kesiapan tenaga pelaksana di sekolah, dan koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Kendala-kendala tersebut menuntut adanya kebijakan lanjutan yang komprehensif, kolaboratif, dan berkelanjutan agar tujuan program dapat tercapai secara maksimal.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan. Pertama, pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, BGN , dan pemerintah daerah agar pelaksanaan program berjalan sinergis dan efisien. Kedua, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kualitas makanan, proses distribusi, serta penggunaan anggaran agar program terlaksana secara transparan dan akuntabel. Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama tenaga pelaksana dan pengelola di tingkat sekolah dan daerah, sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program. Keempat, edukasi gizi kepada siswa, guru, dan orang tua perlu digalakkan agar kesadaran tentang pentingnya asupan makanan sehat menjadi bagian dari budaya sekolah. Kelima, pelibatan UMKM, koperasi, dan petani lokal perlu diperluas agar manfaat program tidak hanya dirasakan oleh peserta didik, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi daerah.

Selain itu, pemerintah disarankan untuk memanfaatkan teknologi digital dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, seperti melalui sistem informasi berbasis data (digital monitoring system) yang dapat memantau distribusi makanan, kualitas gizi, serta tingkat kehadiran siswa penerima manfaat secara real time. Penggunaan teknologi ini juga dapat meningkatkan transparansi publik dan mencegah potensi penyalahgunaan dana. Dukungan dari lembaga pendidikan, masyarakat, dan pihak swasta juga perlu diperkuat melalui kemitraan sosial dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk memperluas cakupan dan keberlanjutan program MBG di masa depan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Program MBG merupakan langkah

progresif yang memiliki dampak luas dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Apabila dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan, program ini akan menjadi fondasi penting bagi terbentuknya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing global. Oleh karena itu, komitmen pemerintah, dukungan masyarakat, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci utama keberhasilan MBG sebagai program unggulan nasional yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan kesejahteraan sosial di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, U., & Mulyani, S. (2025). EFEKTIVITAS DAN TANTANGAN KEBIJAKAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS SEBAGAI INTERVENSI PENDIDIKAN DI INDONESIA EFFECTIVENESS AND CHALLENGES OF FREE NUTRITIOUS MEAL PROGRAM POLICY AS AN EDUCATIONAL. 4, 362–368.
- Albaburrahim, A., Putikadyanto, A. P. A., Efendi, A. N., Alatas, M. A., Romadhon, S., & Wachidah, L. R. (2025). Program Makan Bergizi Gratis: Analisis Kritis Transformasi Pendidikan Indonesia Menuju Generasi Emas 2045. Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial, 767–780. <https://doi.org/10.19105/ejpis.v1i.19191>
- Andi Weyana Nurul Khatimah, Syamsu A Kamaruddin, & A. Octamaya Tenri Awaru. (2025). Rasionalisme Dalam Kebijakan Publik: Analisis Dampak Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Kesejahteraan Pelajar. Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan, 3(4), 1969–1976.

- <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.815>
- Atikah Merlinda, A., & Yusuf, Y. (2025). Analisis Program Makan Gratis Prabowo Subianto Terhadap Strategi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Tinjauan dari Perspektif Sosiologi Pendidikan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 1364–1373.
- Basit, M., & Ramadani, H. (2025). Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Perkembangan Ekonomi. *Journal of Economics Development Research*, 1(2), 49–54. <https://doi.org/10.71094/joeder.v1i2.105>
- Halawa, & Mulyanti. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendidikan Dan Proses Pembelajaran. *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa*, 2(2), 57–64.
- Kelas, S., Di, I. X., & Jakarta, S. (n.d.). 1. Pendahuluan. 1, 39–44.
- Mandiri, J. S., & Yelvianti, T. (2025). Efektivitas Program Makan Gizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo. *Poltekkes Padang*, 20(2), 288–298.
- Nango, M., Purwoko, B., & Hazim, M. (2025). MAKAN BERGIZI GRATIS : STRATEGI KEBIJAKAN PUBLIK MENUJU GENERASI EMAS INDONESIA 2045. 25(2), 354–368.
- Nissa, A. K., Candra, M., Humairoh, T., & Gusyuliandari, S. (2025). Kebijakan Makanan Bergizi Gratis: Analisis Ekonomi Politik dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus: SMP Negeri 4 Tanjungpinang. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11), 33–37.
- <https://doi.org/10.5281/zenodo.15521260>
- Nurul Azzahra, Akbar Dwi Dharmawan, Aras Fikar Mardatilah, Mohamad Ilham Habibi, Virliana Amanda Putri Aryani, & Suhardi. (2025). Pelaksanaan Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis di SMP Negeri 4 Tangerang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 5036–5044. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1335>
- Pringsewu, U. M., Pringsewu, U. M., & Muhammadiyah, U. (2025). Jurnal Penelitian Nusantara Perspektif Guru Terhadap Program Makan Bergizi Dalam Meningkatkan Kualitas Warga Negara Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara. Perspektif Guru Terhadap Program Makan Bergizi Dalam Meningkatkan Kualitas Warga Negara, 1, 20–25.
- Rahayu, L. F. (2025). Dinamika Dukungan Politik Terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia. 8(2), 815–831.
- Rahmah, H. A., Anggraini, A., Nilasari, Y. P., & Salsabilla, E. P. (2025). Analisis Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis Di Sekolah Dasar Indonesia Tahun 2025. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2), 2855–2866.
- Rifiy, Q., Suratni, Lestari, W., & Muhammad, S. (2025). Indonesian journal of intellectual publication iji publication. 5(2), 130–137.
- Zulaika, N., Lestari, D., & Istiqomah, H. (2025). Tantangan Implementasi dan Akuntabilitas Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 01(03), 426–435.